

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang menunjukkan hal yang mengarah kepada kondisi yang lebih baik (Maryozi *et al.*, 2022). Keberhasilan pembangunan dapat terjadi pada saat memenuhi nilai pokoknya meliputi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), manusia yang di dalamnya harga diri yang selalu dijaga (*selfesteem*), dan masyarakat memiliki kebebasan atas pilihannya (*freedom from servitude*) sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia (Todaro & Smith, 2006).

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya terdapat 2 alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan penerima hasilnya. Kedua, penilaian kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi pekerjaan yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik (BPS Kepri, 2024).

Makna pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (Izzah & Hendarti, 2021). Manusia adalah salah satu sumber daya yang memegang peranan sangat penting di dunia ini, maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh peran dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Manusia sebagai subjek pembangunan memiliki peran aktif dalam mengambil bagian pada proses pembangunan, sementara sebagai objek pembangunan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia harus ditingkatkan. Pembangunan manusia bertujuan untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi bagi semua orang (Ulfatussaniah *et al.*, 2024).

Salah satu ayat dengan konsep pembangunan manusia adalah Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.(QS: Adz-Dzariyat ayat 56).

Pada ayat ini jin dan manusia diciptakan untuk tunduk kepada Allah SWT. Beberapa mufassir memberikan makna atas surat ini. Seperti dalam tafsir AlAzhar, manusia diciptakan hanya untuk satu macam tugas saja, yaitu mengabdikan, beribadat. Beribadat yaitu mengakui bahwa kita ini hambaNya, tunduk kepada kemauanNya. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dimaknai bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah dan manusia

mengakui kehambaannya, baik dengan sukarela maupun terpaksa dengan beribadah (Tambunan *et al.*, 2022).

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Handayani, 2015). IPM sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan manusia yang diukur dari komponen dasar kualitas hidup yakni Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks standar Hidup Layak. Dengan adanya peningkatan pembangunan manusia, negara akan mengalami kemajuan dan berkembang (Imelda *et al.*, 2021).

Pembangunan sumber daya manusia sudah dipandang penting oleh pemerintah Indonesia. Melalui tujuan negara yang terdapat pada alinea ke empat UUD 1945, pemerintah mengemban tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Mongan, 2019). Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh negeri seperti program wajib belajar 12 tahun, peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi, serta penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari latar belakang kurang mampu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2022 mengalami percepatan pertumbuhan di semua dimensinya mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan hidup hingga 71,85 tahun, meningkat 0,28 tahun dari tahun sebelumnya, sementara harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun naik 0,02 tahun menjadi 13,10 tahun dan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas bertambah 0,15 tahun menjadi 8,69 tahun, sedangkan standar hidup layak yang diukur dari rata-rata pengeluaran riil per kapita, meningkat sebesar 323 ribu rupiah atau 2,90 persen (BPS, 2022).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang termasuk dalam 10 provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Menurut Handayani (2015), Provinsi Riau telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Bukan hanya karena letak geografisnya yang berada di jalur lintas pulau Sumatera, namun juga angka pertumbuhan ekonominya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi itu juga diikuti dengan tingginya kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya.

Tabel 1.1
10 Provinsi dengan Skor IPM Tertinggi
di Indonesia Tahun 2022

No.	Provinsi	Tahun 2022
1.	DKI Jakarta	81,65
2.	DI Yogyakarta	80,64
3.	Kalimantan Timur	77,44
4.	Kepulauan Riau	76,46
5.	Bali	76,44
6.	Sulawesi Utara	73,81
7.	Riau	73,52

No.	Provinsi	Tahun 2022
8.	Banten	73,32
9.	Sumatera Barat	73,26
10.	Jawa Barat	73,12

Sumber: BPS Indonesia, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan skor IPM 81,65 yang diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan skor IPM 80,64. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi ketiga dengan skor IPM 77,44. Pada posisi keempat yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan kelima yaitu Provinsi Bali memiliki perbedaan yang sangat tipis yaitu hanya sebesar 0,002 poin dengan masing-masing skor IPM 76,46 dan 76,44. Posisi keenam yang ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara memiliki skor IPM 73,81, menandakan perbedaan skor cukup jauh dari posisi sebelumnya sebesar 2,63 poin. Provinsi Riau berada di posisi ketujuh dengan skor IPM 73,52 kemudian diikuti oleh Provinsi Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat dengan masing-masing skor IPM yaitu 73,32, 73,26, dan 73,12.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang berperan untuk menciptakan peningkatan pada pendapatan pemerintah. Selanjutnya, pendapatan tersebut dapat diinvestasikan dalam pembangunan manusia. Investasi ini ditujukan untuk kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan serta kesehatan yang lebih baik sehingga produktivitas pekerja mampu mengalami peningkatan, dan dapat dikembangkannya keterampilan maupun kemajuan teknologi (Muliza *et al.*, 2017). PDRB dapat menjadi indikator kesejahteraan suatu

wilayah karena wilayah yang sejahtera cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga peningkatan PDRB biasanya diikuti oleh peningkatan nilai IPM (Sania *et al.*, 2021).

Tabel 1.2
Pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau
Tahun 2016-2022 (dalam Rupiah)

No.	Tahun	PDRB (Rupiah)
1	2016	682.379.420.000
2	2017	710.256.830.000
3	2018	757.844.830.000
4	2019	765.419.780.000
5	2020	730.297.030.000
6	2021	843.013.910.000
7	2022	994.535.800.000

Sumber: BPS Riau, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau tahun 2019-2023 mengalami tren naik. PDRB pada tahun 2016 sebesar Rp682.379.420.000,00 kemudian naik menjadi Rp710.256.830.000,00 di tahun 2017, Rp757.844.830.000,00 di tahun 2018, dan Rp765.419.780.000,00 di tahun 2019. Penurunan sempat terjadi di tahun 2020 menjadi Rp730.297.030.000,00. Hal tersebut terjadi karena adanya wabah Covid-19 yang mengharuskan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia untuk membatasi aktifitas secara langsung sehingga berdampak pada perekonomian daerah. PDRB kembali mengalami peningkatan menjadi Rp843.013.910.000,00 di tahun 2021, dan Rp994.535.800.000,00 di tahun 2022. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB dengan tren naik dapat mempengaruhi IPM secara positif.

Faktor yang mempengaruhi IPM selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan berpotensi menghambat pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat secara optimal padahal tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jika tingkat kemiskinan di suatu daerah tinggi, maka hal tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Penurunan pendapatan masyarakat akan mengakibatkan berkurangnya daya beli yang berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat menikmati kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak terpenuhi (Trisno *et al.*, 2022).

Tabel 1.3
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi
Riau Tahun 2016-2022 (dalam jiwa)

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
1	2016	515.400
2	2017	514.620
3	2018	500.450
4	2019	490.730
5	2020	483.390
6	2021	500.830
7	2022	485.030

Sumber: BPS Riau, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau tahun 2016-2022 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di tahun 2016 sebanyak 515.400 jiwa dan menurun di tahun 2017 menjadi 514.620 jiwa, 500.450 jiwa di tahun 2018, dan 490.730 jiwa di tahun 2019, dan 483.390 jiwa di tahun 2020. Kenaikan jumlah penduduk miskin

sempat terjadi di tahun 2021 menjadi 500.830 jiwa dan kembali turun menjadi 485.030 jiwa di tahun 2022. Berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berdampak pada akses penduduk terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak meningkat

Menurut Mangkoesobroto (2016), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah karena setiap kebijakan memiliki konsekuensi biaya yang didanai dari anggaran pemerintah, yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap suatu bidang, dengan pemerintah pusat menetapkan UU-APBN dan pemerintah daerah menetapkan APBD sesuai kebijakan pembangunan masing-masing. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi IPM dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya aspek kesehatan. Menurut Maryozi et al. (2022), pada saat belanja atau pengeluaran bidang kesehatan cenderung mengalami peningkatan, maka akan mendorong peningkatan derajat kesehatan selanjutnya akan meningkatkan mendorong peningkatan IPM.

Tabel 1.4
Presentase Anggaran Kesehatan Bersumber APBD Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2022 (dalam persen)

No.	Tahun	Presentase Anggaran Kesehatan Bersumber APBD Kabupaten/Kota (Persen)
1	2016	66
2	2017	71,26
3	2018	71,59
4	2019	81,72
5	2020	85,7
6	2021	87,84
7	2022	92,4

Sumber: Dinkes Riau, 2016-2022

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, presentase anggaran kesehatan bersumber APBD kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2016-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, presentase anggaran kesehatan sebesar 66 persen kemudian naik di tahun-tahun selanjutnya menjadi 71,26 persen di tahun 2017, 71,59 persen di tahun 2018, 81,72 persen di tahun 2019, 85,7 persen di tahun 2020, 87,84 persen di tahun 2021, dan 92,4 persen di tahun 2022. Alokasi anggaran yang tepat untuk sektor kesehatan memungkinkan perbaikan dalam layanan kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta penurunan angka kematian dan penyakit.

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah langkah signifikan dalam menyediakan indikator yang luas dan komprehensif untuk mengevaluasi pembangunan manusia. HDI mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun, karena HDI tidak memperhitungkan prinsip-prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam *Maqashidus Syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka indikator ini dianggap tidak memadai untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Islam Human Development Index (I-HDI) diusulkan sebagai alternatif yang lebih sesuai. I-HDI mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, mencerminkan tujuan syariah dalam setiap dimensinya. Dengan

demikian, I-HDI dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan tentang pembangunan manusia di negara-negara Muslim dan memastikan bahwa evaluasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan Islam, serta lebih mencerminkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat.

Maqashidus syari'ah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial (Janah & Ghofur, 2018). Keadilan dan kemaslahatan ini dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesejahteraan pada umumnya merupakan tercapainya rasa aman, damai dan bahagia. Sedangkan dalam pandangan islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dengan ukuran materi tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material. Kesejahteraan juga tidak hanya diukur dari segi ekonomi melainkan dari segi *Maqashidus Syariah*. Ada 5 pilar utama dalam *Maqashidus Syariah* yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia meliputi menjaga agama (*ad-dien*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal (*al-'aql*), menjaga keturunan (*an-nasl*), dan menjaga harta (*al-maal*) (Setiyawati & Oktafia, 2021).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia kemudian ditinjau dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, penulis memberikan judul pada penelitian ini “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di Provinsi Riau dalam Perspektif Maqashidus Syari'ah Tahun 2016-2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022?
3. Bagaimana pengaruh anggaran kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022?
4. Bagaimana tinjauan dalam *maqashidus syari'ah* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022.

4. Menganalisis bagaimana tinjauan dalam *maqashidus syari'ah* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau tahun 2016-2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada akademisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau dan tinjauannya dalam *maqashidus syari'ah*. Selain itu, penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.

2. Manfaat Praktik

- a. Manfaat bagi pemerintah dan instansi terkait selaku pemangku kebijakan.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pertimbangan keputusan di masa akan datang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.

- b. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi hasil karya tulis yang dapat mengasah kemampuan berpikir penulis dalam melihat permasalahan yang ada mengenai indikator pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.